



Laporan Percepatan Pembangunan Papua



PERIODE AGUSTUS 2025



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya



Kegiatan-Kegiatan Strategis



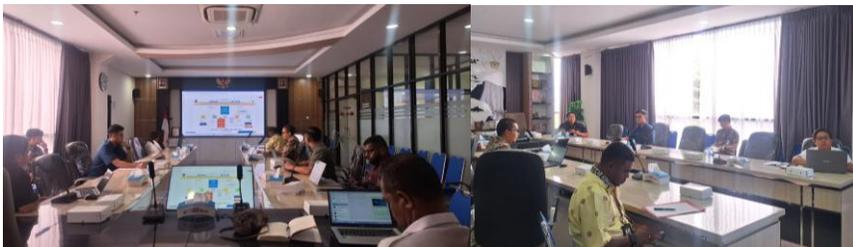


Selama bulan Agustus 2025, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada sektor kesehatan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Sehat. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Sosialisasi Penyakit Stroke Bagi Nakes di Fasyankes Kabupaten Tambrauw (01–03 Agustus 2025, Gedung Pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Tambrauw): Pokja Sehat hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi penanganan penyakit stroke bagi tenaga kesehatan. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman lebih baik mengenai urgensi pencegahan stroke sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan menekan beban sosial.
- Pertemuan dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw (02 Agustus 2025, Kabupaten Tambrauw): Pokja Sehat melaksanakan koordinasi terkait optimalisasi pelayanan Puskesmas Mega. Hasil kegiatan berupa rencana pertemuan lintas kabupaten (Tambrauw–Sorong) untuk membahas status aset Puskesmas.
- Monev RSUD Scholoo Keyen-Misi Papua Sehat (05 Agustus 2025, RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan): Pokja Sehat melakukan evaluasi pengembangan layanan RSUD. Bupati Sorong Selatan dan Direktur RSUD berkomitmen meningkatkan kualitas layanan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.
- Pembentukan Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tambrauw (12 Agustus 2025, Aula RS Pratama Fef): Pokja Sehat melaksanakan sinkronisasi program perlindungan perempuan dan anak serta memberikan materi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan. Hasilnya, terbentuk Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrauw.



PAPUA SEHAT (2)



- Sosialisasi dan FGD Asistensi Pembinaan BLUD (21 Agustus 2025, Kanwil BC Papua): Pokja Sehat mendampingi kegiatan DJPb Papua Barat terkait asistensi pembinaan BLUD. Diskusi menghasilkan pemahaman lebih baik tentang pengelolaan BLUD serta rekomendasi perlunya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.
- Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 (26 Agustus 2025, ACC Aimas): Pokja Sehat mengikuti Rakerkesda yang membahas pemerataan tenaga medis, percepatan program nasional (PKG, stunting, TBC/HIV/malaria), serta peningkatan kualitas data kesehatan. Disepakati rencana rekrutmen dokter spesialis, pembangunan RS rujukan, penguatan posyandu, intervensi gizi 1.000 HPK, serta sinergi lintas sektor.
- Koordinasi dengan Kemenkes RI (Dirjen Yankes)-Pendampingan Pemda Sorong Selatan (27 Agustus 2025, Kantor Kemenkes Jakarta): Pokja Sehat mendampingi Pemda Sorong Selatan dalam audiensi dengan Kemenkes terkait distribusi alat kesehatan untuk RSUD Scholoo. Hasil kegiatan berupa komitmen Kemenkes memperkuat layanan kesehatan di Sorong Selatan.
- Koordinasi dengan Kemenkes RI (Dirjen SDM Kesehatan)-Pendampingan Pemda Sorong Selatan (29 Agustus 2025, Kantor Kemenkes Jakarta): Pokja Sehat melaksanakan koordinasi perencanaan SDM kesehatan bersama Dirjen SDM Kesehatan. Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas penempatan SDM KJSU-KIA, dengan tindak lanjut penilaian kesiapan RSUD Scholoo.



PAPUA CERDAS



Selama bulan Agustus 2025, Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap program prioritas di sektor pendidikan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Cerdas. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Monev Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan-Misi Papua Cerdas (05 Agustus 2025, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan): Pokja Cerdas melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Dinas Pendidikan serta pelaksanaan program SSH di Sorong Selatan. Hasilnya, teridentifikasi faktor-faktor yang memperlambat penyusunan Renstra OPD dan hambatan dalam SSH, serta tersusunnya dokumen sidang komisi berisi masalah dan rekomendasi pendidikan di Tanah Papua.
- Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (26 Agustus 2025, Kantor BKN Jakarta): Pokja Cerdas melaksanakan koordinasi terkait implementasi Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN/P3K, serta membahas status nonaktif jabatan fungsional dosen di BP3OKP. Hasil kegiatan berupa arahan teknis sinkronisasi regulasi ASN, rencana validasi redistribusi guru pada November 2025, serta rekomendasi perlunya MoU formal antara BP3OKP, perguruan tinggi asal, dan BKN untuk mendukung penugasan dosen tanpa menghambat karier akademik.
- Koordinasi dengan Kemendikdasmen-Pendampingan Pemda Sorong Selatan (29 Agustus 2025, Kantor Kemendikdasmen Jakarta): Pokja Cerdas melaksanakan koordinasi SHEK bersama Sesdirjen GTTPG Kemendikdasmen RI mengenai redistribusi guru ASN/P3K, implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2023, serta pelaksanaan PPG Bauran. Hasilnya, BP3OKP diminta mendorong sinkronisasi program Papua Cerdas dengan kebijakan daerah, validasi distribusi guru pasca-penginputan Dapodik, serta fasilitasi pelaksanaan PPG Bauran melalui dukungan anggaran daerah.

PAPUA PRODUKTIF (1)

Selama bulan Agustus 2025, Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di sektor ekonomi, pangan, dan pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Produktif. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Monev Program MBG di Kabupaten Sorong Selatan (Dinas Ketahanan Pangan dan SPPG) Misi Papua Produktif (05 Agustus 2025, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sorong Selatan & SPPG): Pokja Produktif melakukan monitoring untuk memastikan potensi pangan lokal dapat mendukung rantai pasok MBG. Hasil kegiatan menunjukkan perlunya optimalisasi peran penyuluh lapang, percepatan pembentukan Satgas MBG, serta revitalisasi lahan pertanian dengan dukungan Kodim 1807.
- Monev Program MBG di Kabupaten Sorong (SPPG Klamasen) (11 Agustus 2025, Distrik Klamasen, Kabupaten Sorong): Pokja Papua Produktif melaksanakan monitoring dan evaluasi ke SPPG Klamasen terkait temuan makanan berulat pada program MBG. Hasil kegiatan menunjukkan adanya human error dalam prosedur penyajian makanan. Pokja merekomendasikan penandatanganan pakta integritas oleh penyedia, perbaikan SOP dapur, penundaan sementara proses memasak, serta percepatan pengesahan Satgas MBG Kabupaten Sorong oleh Bupati.
- Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya Tahun 2025 (11–12 Agustus 2025, Rylich Panorama Hotel Sorong): Pokja Produktif hadir dalam jambore masyarakat adat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan identitas budaya dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi lokal.
- Rapat Koordinasi Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya (18 Agustus 2025, Kantor DPMPSTSP Kabupaten Sorong): Pokja Produktif mengikuti rapat koordinasi Satgas MBG terkait kendala teknis di SPPG Klamasen. Hasilnya, pihak penyedia mengakui adanya human error dan bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melanjutkan operasional dapur MBG.
- Rapat Evaluasi Ranperda RPJMD PBD Tahun 2025–2029 (19 Agustus 2025, Sekretariat BP3OKP – Hybrid/Zoom): Pokja Produktif berperan dalam evaluasi substansi RPJMD Provinsi Papua Barat Daya. Hasil kegiatan mencakup masukan terkait indikator kinerja, prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta strategi pembiayaan pembangunan.





PAPUA PRODUKTIF (2)



- Rapat Koordinasi Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya (20 Agustus 2025, Kantor Gubernur PBD): Pokja Produktif menghadiri rapat koordinasi yang membahas kelemahan Satgas MBG, khususnya kurang jelasnya pembagian peran dan pendanaan. Disepakati perlunya revisi SK Satgas, penyusunan pedoman pembagian tugas, serta penetapan sumber pendanaan yang jelas.
- Rapat Koordinasi KEK Sorong (20 Agustus 2025, Kediaman Bupati Sorong): Pokja Produktif mengikuti rakor lanjutan terkait penyelamatan KEK Sorong. Hasil kegiatan berupa kesepakatan pembangunan infrastruktur pendukung (jalan, air bersih, kantor sekretariat), revitalisasi komitmen investor, serta rencana advokasi ke pemerintah pusat untuk mempertahankan status KEK Sorong.
- Sosialisasi dan FGD Perluasan Jangkauan Penyaluran Pembiayaan UMKM, Monev & Bimtek SIKP, serta Pinjaman KDMP (21 Agustus 2025, Kanwil BC Papua): Pokja Produktif mendampingi pelaksanaan FGD oleh DJPb Papua Barat. Hasilnya, meningkatnya pemahaman stakeholder terkait akses pembiayaan UMKM, pemanfaatan SIKP, serta tata cara pinjaman KDMP untuk memperkuat ekosistem pembiayaan produktif di Papua Barat Daya.
- Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perumahan Perkotaan) (25 Agustus 2025, Kantor Kementerian PKP Jakarta): Pokja Produktif melaksanakan koordinasi terkait program perumahan afirmatif. Hasil kegiatan mencakup skema kredit perumahan khusus Papua, integrasi program dengan RPJMD & RIPP, serta rekomendasi desain rumah adat dan model pembiayaan kontekstual.
- Audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong (27 Agustus 2025, Sekretariat BP3OKP PBD): Pokja Produktif menerima permohonan audiensi dari BPS. Hasil kegiatan, pihak BPS Kota Sorong meminta untuk dapat difasilitasi pertemuan dengan Pemda Kota Sorong terkait kebutuhan data produk unggulan dan survei MBG. Audiensi ini juga menghasilkan komitmen penyediaan data yang lebih lengkap, koordinasi resmi dengan Pemda, serta tindak lanjut survei MBG.
- Koordinasi dengan Perum Perhutani – Pendampingan Pemda Sorong Selatan (28 Agustus 2025, Kantor Perum Perhutani Jakarta): Pokja Produktif mendampingi Pemda Sorong Selatan dalam koordinasi dengan Perhutani terkait reaktivasi pabrik sagu di Distrik Kais. Hasil kegiatan berupa rencana optimalisasi potensi sagu lokal, pemberdayaan masyarakat adat melalui koperasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta dukungan pada program nasional hilirisasi pangan dan MBG.



PAPUA POLHUKAM/DAMAI

Selama bulan Agustus 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada isu strategis tata ruang, pertahanan-keamanan, serta aspirasi masyarakat adat dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Damai. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Audiensi dengan Kepala Bandara Teminabuan, Kepala Bandara Inanwatan, dan Masyarakat Adat (01 Agustus 2025, Sekretariat BP3OKP PBD): Pokja Damai melaksanakan koordinasi terkait status lahan dan hak ulayat bandara di Sorong Selatan dan Inanwatan. Hasil kegiatan berupa rencana mediasi penyelesaian hak ulayat Bandara Teminabuan dengan masyarakat adat, serta koordinasi lanjutan dengan Kementerian Perhubungan. Untuk Bandara Inanwatan, disepakati perlunya koordinasi bersama DLHK Provinsi dan Kementerian ATR/BPN guna menyelesaikan status lahan yang berada dalam kawasan hutan lindung.
- Monev Kodim 1807/Sorong Selatan (05 Agustus 2025, Kodim 1807 Kabupaten Sorong Selatan): Pokja Damai melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kodim 1807 mengenai peran aparat teritorial dalam pembangunan dan stabilitas keamanan. Hasil kegiatan menekankan pentingnya revitalisasi Moswaren sebagai sentra pertanian, penyediaan irigasi pertanian, serta kolaborasi TNI–Pemda–BP3OKP untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas sosial.
- Audiensi dengan LMA Kaiso (12 Agustus 2025, Sekretariat BP3OKP PBD): Pokja Damai mendengarkan aspirasi masyarakat adat Kaiso terkait keterwakilan politik dan distribusi manfaat ekonomi SDA. Hasil kegiatan mengungkap ketidakadilan dalam proses politik lokal serta belum meratanya manfaat ekonomi dari industri sawit dan hutan. Pokja merekomendasikan advokasi aspirasi politik, audit manfaat ekonomi oleh perusahaan, serta investigasi distribusi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit senilai Rp 2,18 miliar yang menjadi hak masyarakat adat Kaiso.

KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029



Forum SHEK – Rapat Koordinasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025–2029



Musrenbang RPJMD Kabupaten Maybrat



Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong



Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat Daya



Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas



Rapat Pembahasan Sasaran, Visi dan IUP Ranperda RPJPD dan RPJMD



Musrenbang RPJMD Kabupaten Maybrat



Musrenbang RPJMD Kota Sorong

Pada bulan Agustus 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melalui seluruh Pokja (Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai/Polhukam) kembali mengoptimalkan perannya dalam penguatan koordinasi lintas sektor, sinkronisasi perencanaan, serta pengawalan terhadap berbagai agenda prioritas pembangunan. Kehadiran BP3OKP di berbagai forum dan ruang strategis tidak hanya untuk memfasilitasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap arah kebijakan dan dokumen perencanaan di Papua Barat Daya sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Upaya ini sekaligus menegaskan posisi BP3OKP sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pusat dan daerah, serta sebagai pengawal agar proses perencanaan dan implementasi program benar-benar berlandaskan prinsip tata kelola yang baik dan inklusif.

Adapun kegiatan strategis bersama yang terlaksana sepanjang Agustus 2025 meliputi:

Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029 (01 Agustus 2025, Sekretariat BP3OKP PBD): difokuskan pada penyelarasan substansi RPJMD dengan RPJMN dan RAPPP, termasuk perbaikan visi–misi, penguatan aspek masyarakat adat, serta strategi diversifikasi pendanaan pembangunan.

Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong (07 Agustus 2025, Aula Inspektorat Kab. Sorong): menghasilkan kesepakatan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis lokal, penguatan konektivitas, reformasi birokrasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Rapat Pembahasan Sasaran, Visi dan IUP Ranperda RPJPD dan RPJMD (07 Agustus 2025, Kantor Gubernur PBD): BP3OKP melakukan monitoring terhadap rancangan RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Forum ini menyepakati penundaan pembahasan guna memberi waktu DPRD memperdalam kajian, dengan menegaskan RIPPP dan RAPPP sebagai rujukan utama.

Forum SHEK – Rapat Koordinasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025–2029 (07 Agustus 2025, Aula KPPN Sorong): memfasilitasi pihak Bappeda dan APIP daerah se-Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan materi sebagai bentuk penguatan dan pembekalan terhadap penyusunan dokumen RPJMD. Dalam forum ini Bappenas, Kemendagri, BPS, dan APIP daerah/BPKP sebagai pemateri utama. Hasilnya, terbentuk kesepakatan dan Matriks Program Prioritas Bersama yang menekankan integrasi data sektoral, peningkatan kapasitas perencana daerah, serta partisipasi kelompok strategis masyarakat.

Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat Daya (08 Agustus 2025, Hotel Vega Sorong): memperkuat sinkronisasi RPJMD dengan RIPPP dan RPJMN 2025–2029, dengan hasil penajaman visi pembangunan daerah pada lima pilar utama, yakni SDM, ekonomi lokal, infrastruktur, tata kelola, dan lingkungan.

Musrenbang RPJPD Kabupaten Maybrat (12 Agustus 2025, Gedung Samusiret Kumurkek): memfasilitasi kesepakatan visi–misi pembangunan jangka panjang yang menekankan prioritas SDM, ekonomi lokal, infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan, dan tata kelola digital partisipatif.

Musrenbang RPJMD Kabupaten Maybrat (19 Agustus 2025, Gedung Samusiret Kumurkek): menghasilkan kesepakatan pembangunan lima tahun di Maybrat dengan prioritas pendidikan dan kesehatan inklusif, UMKM dan pariwisata, konektivitas wilayah, serta afirmasi untuk masyarakat adat dan kelompok rentan.

Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas (25 Agustus 2025, Menara Bappenas): menegaskan peran Bappenas sebagai quality assurance atas RAPPP sekaligus memastikan konsistensi RPJMD di wilayah Papua dengan RPJMN dan RIPPP.

Musrenbang RPJMD Kota Sorong (25 Agustus 2025, Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong): memperkuat dokumen RPJMD Kota Sorong dengan indikator yang lebih terukur, afirmasi untuk OAP dan kampung adat, serta fokus pada isu prioritas seperti banjir, peningkatan mutu pendidikan, layanan dasar, dan diversifikasi ekonomi kota.

Keseluruhan rangkaian kegiatan di atas menegaskan kiprah BP3OKP Papua Barat Daya sebagai motor koordinasi pembangunan yang memastikan keterpaduan arah kebijakan pusat dan daerah. Dengan pendekatan kolaboratif, BP3OKP berperan menjaga agar program-program prioritas tidak hanya sinkron di atas dokumen, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya. Peran strategis ini menjadi fondasi bagi terwujudnya Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan damai, sejalan dengan misi besar RIPPP.

Capaian & Rekomendasi





CAPAIAN

Selama bulan Agustus 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai agenda penting yang menitikberatkan pada sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan implementasi program prioritas nasional di Papua Barat Daya. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan dasar, dan advokasi aspirasi masyarakat adat juga menjadi bagian integral dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Adapun capaian utama yang berhasil dicatat selama bulan ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Infrastruktur & Tata Ruang

- Audiensi dengan pengelola Bandara Teminabuan dan Inanwatan serta masyarakat adat terkait penyelesaian hak ulayat dan status lahan bandara.
- Penegasan pentingnya kepastian hukum tata ruang untuk mendukung pembangunan transportasi udara di kawasan Sorong Selatan dan Inanwatan.

2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- Pendampingan Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya 2025–2029 bersama Kemendagri, Bappenas, dan Bapperida.
- Keterlibatan dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong dan Maybrat, serta penyusunan RPJPD Maybrat.
- Forum SHEK dan Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat Daya menjadi momentum strategis harmonisasi perencanaan lintas daerah dengan RPJMN, RPJPN, dan RIPP.

3. Penguatan Layanan Kesehatan & Pendidikan

- Sosialisasi penanganan penyakit stroke bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrauw.
- Monitoring RSUD Scholoo Keyen serta koordinasi peningkatan layanan Puskesmas Mega.
- Monev penyusunan Renstra Pendidikan dan program SSH di Sorong Selatan.
- Pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrauw.

4. Pemberdayaan Ekonomi & Ketahanan Pangan

- Monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, termasuk evaluasi teknis SPPG Klamasen serta pembentukan Satgas MBG kabupaten/kota.
- Kolaborasi dengan Kodim 1807 Sorong Selatan dalam revitalisasi Moswaren sebagai sentra pertanian.
- FGD dan asistensi pembiayaan UMKM, KDMP, serta BLUD bersama DJPb Papua Barat.

5. Kolaborasi Pusat–Daerah & Kebijakan Nasional

- Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengesahan RAPP sebagai acuan resmi pembangunan Papua.
- Koordinasi dengan Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman untuk program rumah rakyat afirmatif di Papua Barat Daya.
- Rapat koordinasi penyelamatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi strategis.

6. Kebangsaan, Sosial, & Adat

- Partisipasi aktif dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Papua Barat Daya (pengibaran, penurunan bendera, upacara, resepsi kenegaraan).
- Audiensi dengan LMA Kaiso untuk menindaklanjuti isu keterwakilan politik, manfaat ekonomi SDA, dan distribusi Dana Bagi Hasil Sawit.
- Kehadiran pada Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya sebagai dukungan terhadap penguatan identitas dan kebersamaan masyarakat adat.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan rekapitulasi kegiatan dan capaian antara lain :

1. **Percepatan Penyelesaian Status Lahan & Tata Ruang** : Perlu segera dilakukan mediasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian hak ulayat bandara Teminabuan dan status lahan Bandara Inanwatan agar kepastian hukum pembangunan infrastruktur tercapai.
2. **Penguatan Sinkronisasi Perencanaan Daerah** : RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus terus dikawal agar konsisten dengan RPJMN, RIPP, RAPP, dan kebijakan afirmatif Papua, sehingga arah pembangunan lebih terukur dan tidak tumpang tindih.
3. **Optimalisasi Layanan Dasar Sehat & Cerdas** : Peningkatan kualitas layanan RSUD, Puskesmas, dan pendidikan perlu diprioritaskan dengan indikator kinerja yang jelas, sambil memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui evaluasi berkala.
4. **Penguatan Ekonomi Lokal & MBG** : Program MBG harus berbasis pada rantai pasok petani lokal OAP dengan dukungan Satgas yang efektif, jelas peran, dan sumber pendanaannya. Revitalisasi Moswaren sebagai lumbung pangan strategis perlu dipercepat.
5. **Afirmasi UMKM, BLUD & Perumahan** : Akses pembiayaan UMKM, KDMP, dan BLUD harus diperluas dengan asistensi teknis yang berkelanjutan. Program perumahan afirmatif perlu memperhatikan desain lokal dan kebutuhan masyarakat adat.
6. **Penguatan Tata Kelola & Akuntabilitas** : Diperlukan penguatan koordinasi dengan Bappenas, DJPb, dan Kemenkeu terkait akurasi data sektoral, transparansi pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis Satu Data Papua.
7. **Advokasi Aspirasi Masyarakat Adat** : Aspirasi politik dan ekonomi masyarakat adat (seperti LMA Kaiso) perlu diakomodasi dalam kebijakan formal. Mekanisme distribusi manfaat SDA dan Dana Bagi Hasil harus transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.

Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua** Periode Bulan **Agustus 2025** **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.**





Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

AGUSTUS 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Barat Daya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Agustus 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 10 September 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihalauw, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN & CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	81
BAB III PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Agustus 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan Agustus 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

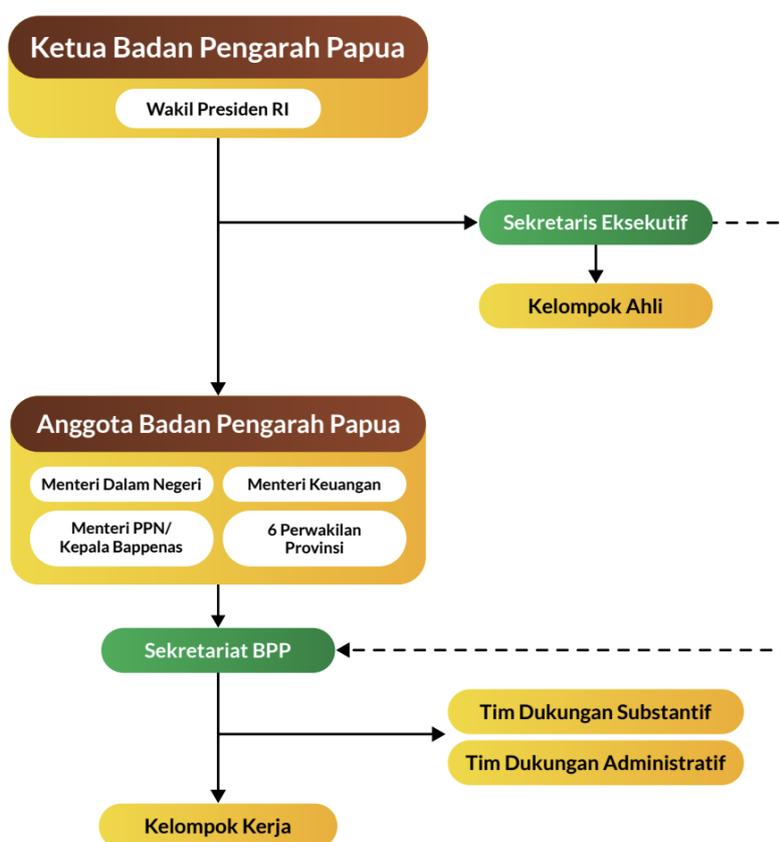
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
	Usulan Pokja yang Aktif Terlibat	2
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
	Jumlah	13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompur Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Agustus tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Kepala Bandara Teminabuan, Kepala Bandara Inanwatan, dan Masyarakat Adat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	01 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tujuan audiensi dengan pengelola bandara :</p> <p>A. Bandara Teminabuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang Status Lahan & Hak Ulayat 2. Membahas skema penyelesaian hak ulayat, apakah melalui ganti rugi, pelepasan hak, konsinyasi, atau perjanjian pemanfaatan tanah dengan masyarakat adat 3. Menegaskan perlunya kepastian hukum agar pengembangan bandara teminabuan dapat dilaksanakan tanpa hambatan sosial <p>B. Bandara Inanwatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi terkait status Bandara Inanwatan selanjutnya menjadi dasar informasi resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian ATR/BPN mengenai status lahan Bandara Inanwatan yang masih berada dalam kawasan hutan lindung 2. Memperoleh kepastian hukum terkait tata ruang dan peruntukan lahan bandara
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota dan Pokja Produktif); Kepala Bandara Teminabuan; Kepala Bandara Inanwatan; Masyarakat Adat (Marthen)

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian hak ulayat pada lahan Bandara Teminabuan akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan mediasi antara masyarakat pemilik hak ulayat, Kantor Unit Pelayanan Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Teminabuan, dan Bupati Sorong Selatan. Selain itu, diperlukan pula koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 2. Penerbitan sertifikat Bandar Udara Inanwatan yang berlokasi pada kawasan hutan lindung perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Selanjutnya, proses ini dapat ditindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Bandara Teminabuan, perlu dilakukan mediasi bersama pihak terkait guna mendorong percepatan penyelesaian hak ulayat pada kawasan bandara. 2. Untuk Bandara Inanwatan, perlu dilakukan koordinasi tindak lanjut dengan pihak terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi serta Kementerian ATR/BPN.
Dokumentasi	



2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	01 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan sinkronisasi program perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat Daya serta evaluasi penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat Daya, guna memberikan pembobotan dan perbaikan terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota dan Pokja); Kemendagri-Bangda; Bapperida PBD; Bappenas; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil koreksi dan sinkronisasi dari Kementerian/Lembaga telah disampaikan kepada Bapperinda Provinsi Papua Barat Daya serta telah diinput melalui link yang diberikan. 2. Badan Pengarah Papua memberikan koreksi sekaligus menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan RAPP sebagai kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, yang diharapkan menjadi acuan bagi

pembangunan jangka menengah di Provinsi Papua Barat Daya.

3. Pendanaan & Sinergi

Sumber pendanaan perlu dijelaskan secara lebih rinci, meliputi Otsus, DBH Migas, TKD, serta alternatif lainnya seperti KPBU, CSR, dan investasi swasta.

4. Catatan Teknis

- Perlu perbaikan sistematika dan bagan dokumen (mengacu pada format Bappenas).
- Perlu penambahan aspek masyarakat adat dalam gambaran umum.
- Konsistensi dengan RIPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif) masih harus diperkuat.
- Intinya, RPJMD Papua Barat Daya masih berada pada tahap Ranwal sehingga memerlukan penyesuaian indikator, penajaman visi-misi, penambahan lokus prioritas, integrasi OAP/adat, serta penajaman pendanaan agar konsisten dengan RPJMN dan RIPP.

5. Sinkronisasi Nasional

RPJMD wajib selaras dengan RPJMN, RPJPD, RIPP, serta Perpres 12/2025. Saat ini masih terdapat perbedaan pada baseline, target, dan indikator kunci (misalnya LPE, PDRB per kapita, kemiskinan, stunting, emisi, dan lain-lain).

6. Substansi Dokumen

Visi, misi, tujuan, dan sasaran masih perlu diperjelas. Ditemukan adanya visi ganda, indikator yang tidak relevan/inkonsisten, tabel yang tidak runtut, serta target yang terlalu rendah atau terlalu umum.

7. Lokus & Kebijakan Strategis

Perlu penambahan lokus prioritas, antara lain perbatasan, transmigrasi, Kota Sorong sebagai ibu kota DOB, sentra udang/rumput laut, serta afirmasi daerah tertinggal.

	<p>8. Data & Indikator</p> <p>Masih terdapat ketidaksesuaian data baseline (misalnya RLS, cakupan malaria, NTP, dan hunian layak). Indikator khusus untuk OAP, masyarakat adat, dan SDGs juga perlu ditambahkan.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Diharapkan Bapperinda, sebagai OPD yang mengoordinasikan penyusunan RPJMD, dapat lebih proaktif dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selaras dengan arah pembangunan nasional (RPJMN) serta mengacu pada RAPPP. Hal ini mencakup harmonisasi indikator, penyempurnaan visi dan misi, penambahan lokus prioritas, integrasi OAP/adat, penguatan aspek pendanaan, serta perbaikan teknis dokumen sebelum memasuki tahap Rankir.</p>
<p>Dokumentasi</p>	 

3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Sosialisasi Penyakit Stroke Bagi Nakes di Fasyankes Kabupaten Tambrauw
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	01-03 Agustus 2025 di Gedung Pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Tambrauw
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Penyakit Stroke bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Tambrauw. 2. Melaksanakan sinkronisasi program penanganan stroke dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tambrauw.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); Dinas Kesehatan, RSUD, Pemda Kab Tambrauw; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Tercapainya pemahaman yang diharapkan oleh peserta kegiatan mengenai urgensi penanganan kasus stroke sebagai upaya pengendalian angka usia harapan hidup yang berdampak pada produktifitas masyarakat serta menurunkan beban sosial yang dapat terjadi sebagai dampak dari penyakit stroke tersebut
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelaporan berkala terkait kegiatan pengecekan kesehatan gratis. 2. Melaporkan capaian target dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.



4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tamberauw
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	02 Agustus 2025 di Kabupaten Tamberauw
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan koordinasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan di Puskesmas Mega.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab Tamberauw

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Diupayakan adanya pertemuan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong untuk membahas status Puskesmas Mega.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan pertemuan antara dua kabupaten untuk membahas aset bidang kesehatan di wilayah perbatasan.
Dokumentasi	

5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	04 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima berkas undangan dan permohonan narasumber dalam kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Tim Bappeda Kab Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Anggota BP3OKP PBD menerima dengan baik undangan dan permohonan dari pihak Bappeda Kabupaten Sorong.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BP3OKP PBD siap hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong Tahun

	2025-2029, serta siap terlibat aktif sekaligus akan menyusun review terhadap dokumen RPJMD.
Dokumentasi	

6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Monev Kodim 1807/Sorong Selatan (Kodam 807) Misi Papua Polhukam/Damai
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	05 Agustus 2025 di Kodim 1807/Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1807 Kabupaten Sorong Selatan. 2. Melakukan koordinasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan TNI-AD Batalyon Teritorial Binaan (TB) dalam peningkatan usaha pertanian rakyat. 3. Memperkuat sinergi dengan menjalin koordinasi antara pemerintah daerah, aparat teritorial, dan masyarakat guna menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif di Papua. 4. Mendorong peran pembangunan melalui identifikasi potensi kontribusi Batalyon Teritorial dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan sosial dengan pendekatan teritorial yang humanis. 5. Menguatkan konsep Papua Damai dengan menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pentingnya pendekatan non-kekerasan, dialog, dan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

	6. Membangun kolaborasi program melalui pembahasan peluang kerja sama antara pemerintah daerah, Batalyon Teritorial, dan mitra pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, koperasi, pertanian, serta perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Pemda Kab Sorong Selatan; Kodim 1807/Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif & Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu digiatkan kembali semangat kerja petani, terutama di Moswaren, yang lahan pertaniannya banyak beralih fungsi menjadi area usaha maupun pemukiman. Salah satu isu strategis yang harus mendapat perhatian adalah mengembalikan peran Moswaren sebagai sentra pertanian di Kabupaten Sorong Selatan. Moswaren yang dulunya merupakan wilayah transmigrasi dan sumber produksi komoditas pertanian kini menghadapi tantangan karena beberapa fasilitas dan prasarana pendukung tidak berfungsi maksimal. Kehadiran Kodim 1807 diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan revitalisasi Moswaren sebagai kawasan penyangga pertanian. 2. Diperlukan upaya penyediaan dan penguatan irigasi bagi daerah pertanian di Moswaren untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan. 3. Bupati telah menyediakan lahan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mendorong peningkatan ketahanan pangan di daerah tersebut. 4. BP3OKP menyatakan siap bersinergi dengan Kodim 1807 dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua. 5. Kodim 1807 mengharapkan dukungan dari BP3OKP serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk berkolaborasi dalam mendukung program-program pembangunan yang dijalankan.

Rekomendasi/Rencana
Tindaklanjut

Melaksanakan percepatan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. BP3OKP akan terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Kodim 1807 guna mengoptimalkan peran dan fungsi TNI dalam percepatan pembangunan daerah, peningkatan ketahanan pangan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.



Dokumentasi



7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Monev Program MBG di Kabupaten Sorong Selatan (Dinas Ketahanan Pangan dan SPPG) Misi Papua Produktif
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	05 Agustus 2025 di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan & SPPG
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi mengenai potensi dan kemampuan produksi pangan lokal untuk mendukung rantai pasok MBG. 2. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat tani serta pelaku UMKM pangan. 3. Menjadi instrumen strategis dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan, sekaligus memastikan keberlangsungan program MBG serta kesiapan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyiapkan ketahanan pangan guna mengantisipasi inflasi akibat program MBG.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Dinas Ketahanan Pangan Kab Sorong Selatan; Pengurus SPPG
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut untuk mengawal suplai dan ketersediaan bahan pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Peran petugas penyuluh lapang (PPL) sebagai elemen pendukung dalam membina dan menggerakkan kelompok tani belum berjalan optimal. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi berbagai pihak guna meningkatkan peran petani, khususnya petani lokal OAP.
3. Kodim 1807 akan diperbantukan dalam bidang pertanian pada lahan seluas 50 hektare untuk penyediaan komoditas pertanian guna mendukung program MBG di Sorong Selatan.
4. Dua persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG adalah berkurangnya tenaga petani serta belum beroperasinya dapur MBG di Sorong Selatan karena kendala teknis, termasuk rumitnya proses pengajuan calon dapur melalui website BGN.
5. Ketersediaan sayur-sayuran di wilayah Imeko perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan program MBG.
6. Ketersediaan tenaga PPL juga harus diperhatikan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus mencegah inflasi akibat program MBG.
7. Pihak SPPG akan tetap mengutamakan bahan makanan dari pasar lokal, dan apabila stok tidak mencukupi, pasokan akan diambil dari luar daerah.
8. Mama-Mama Papua yang berjualan di Pasar Kajase berasal dari berbagai wilayah seperti Maybrat, Wersar, Sawiat, dan Imeko. Mereka menjual hasil kebun berupa sayur-sayuran dan umbi-umbian. Perlu dilakukan penertiban lapak jualan agar lebih tertata.
9. Retribusi di Pasar Kajase mengalami kebocoran PAD karena minimnya fasilitas pendukung retribusi dan rendahnya kepatuhan wajib retribusi. Selain itu, Terminal Pasar Kajase yang belum difungsikan juga mengurangi potensi PAD.
10. Perlu percepatan pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten.

	<p>11. Peta kerawanan dan sebaran pangan memiliki peran penting dalam mendukung jalur distribusi pangan sekaligus menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan daerah segera melakukan koordinasi lintas OPD (Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan) untuk mendorong percepatan pembentukan Satgas MBG, dengan Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sector. 2. Rencana peletakan batu pertama SPPG oleh Presiden di Sorong didorong agar juga dapat dilakukan di Sorong Selatan dalam rangka kunjungan kerja. 3. BPP akan mendorong pengembangan website yang memuat database ketersediaan bahan makanan, serta mengupayakan edaran Satgas MBG PBD agar menu di SPPG lebih bervariasi dan dipadukan dengan menu lokal seperti sagu dan ubi-ubian. 4. BPP akan mendorong pelaksanaan program MBG di Sorong Selatan untuk mengutamakan petani lokal dan pemanfaatan bahan makanan dari Sorong Selatan, dengan opsi tambahan pasokan dari Sorong apabila stok tidak mencukupi. 5. Dalam Juknis Satgas, BPP akan mendorong pembatasan pengajuan mitra dapur dari luar wilayah Papua Barat Daya. 6. Mendorong Ibu Bupati untuk melakukan penertiban lapak jualan mama-mama Papua di Pasar Kajase agar lebih tertib dan teratur. 7. Mendorong perbaikan fasilitas retribusi pasar dan renovasi terminal pasar sehingga dapat difungsikan, serta mendorong penetapan Peraturan Daerah terkait retribusi, mengingat Perdasi Retribusi telah terbit pada 18 Juli lalu.



8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Monev Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan-Misi Papua Cerdas
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	05 Agustus 2025 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan fungsi koordinasi (Tika) dalam rangka pemantauan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan. Melaksanakan sesi evaluasi terhadap program percepatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan, yakni SSH.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Pokja Cerdas telah melaksanakan fungsi koordinasi sehingga mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang menjadi faktor penyebab lambatnya proses penyusunan Dokumen Renstra OPD, sekaligus hambatan dalam pelaksanaan program SSH di Kabupaten Sorong Selatan. Tersusunnya dokumen hasil sidang komisi yang

	memuat identifikasi masalah pendidikan di Tanah Papua beserta rekomendasinya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Draf Renstra OPD yang telah disiapkan oleh dinas akan dipelajari lebih lanjut dan disinkronkan dengan RIPPP serta Program Prioritas Kemendikdasmen, sambil menunggu terbitnya Renstra Kementerian sebagai acuan utama.
Dokumentasi	

9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Monev RSUD Scholoo Keyen-Misi Papua Sehat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	05 Agustus 2025 di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan pengembangan layanan RSUD Scholoo Keyen.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); RSUD Scholoo Keyen
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat komitmen dari Bupati Sorong Selatan untuk meningkatkan layanan RSUD Scholoo sesuai dengan arah kebijakan layanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Direktur RSUD Scholoo berkomitmen untuk mengupayakan layanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu melakukan penyelarasan antara program unggulan layanan RSUD dengan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
Dokumentasi	

10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	06 Agustus 2025 di Lapangan Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Bupati Kab Sorong Selatan; Pemda Kab Sorong Selatan; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-



11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07 Agustus 2025 di Aula Inspektorat Kabupaten Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, termasuk penyesuaian RPJMD dengan RPJMN, RPJPN, dan RIPPP, memetakan isu-isu strategis lokal yang relevan dengan agenda nasional, dan memberi arahan terkait penetapan program prioritas dan indikator kinerja utama (IKU) untuk periode lima tahun mendatang.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat & Produktif); Pemda Kab Sorong; Bappeda Kab Sorong; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)

<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>Tim penyusun menerima berbagai saran dan berkomitmen untuk memperbaiki dokumen sesuai dengan masukan yang diberikan. Melalui Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2025–2029, diharapkan tercapai kesepakatan arah kebijakan RPJMD Sorong 2025–2030 yang mencakup: peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kemiskinan; penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata; peningkatan infrastruktur serta konektivitas wilayah; penguatan tata kelola pemerintahan yang digital dan partisipatif; serta pembangunan berkelanjutan berbasis pelestarian lingkungan.</p> <p>Selain itu, program prioritas RPJMD Sorong 2025–2030 diharapkan selaras dengan percepatan pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Papua Sehat dan Cerdas berkaitan dengan peningkatan layanan pendidikan serta kesehatan yang inklusif, sementara Papua Produktif berorientasi pada penguatan ketahanan pangan, pertanian modern, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, diperlukan daya dukung berupa infrastruktur konektivitas (jalan distrik, bandara perintis, telekomunikasi, listrik), reformasi birokrasi digital (transparansi, partisipasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi), serta pembangunan lingkungan lestari (perlindungan hutan, pengelolaan energi terbarukan, dan adaptasi perubahan iklim).</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Setelah tahapan Musrenbang RPJMD dan dilakukan perbaikan dokumen, maka akan dilaksanakan tahap selanjutnya. Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong 2025–2030 telah menghasilkan kesepakatan arah pembangunan yang selaras dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Perpres No. 12 Tahun 2023 tentang RPJPN 2025–2045, serta Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang RIPP. Implementasi RPJMD ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Sorong yang Sejahtera, Tangguh, Inklusif, dan Maju, sekaligus memberikan kontribusi nyata</p>

	bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan Papua Sejahtera 2041.
Dokumentasi	 

12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Rapat Pembahasan Sasaran, Visi dan IUP Ran Perda RPJPD dan RPJMD
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07 Agustus 2025 di Kantor Gubernur PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap sasaran, visi, serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Cerdas); Gubernur PBD; Pemda PBD; Bapperida; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Disepakati untuk menunda pembahasan mengenai Sasaran, Visi, dan IUP Ranperda RPJPD 2025–2045

	<p>serta RPJMD 2025–2029 selama 7 (tujuh) hari. Penundaan ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen-dokumen terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Diidentifikasi bahwa belum selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya periode 2025–2044 menjadi salah satu kendala dalam penyusunan Ranperda RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. 3. Ditegaskan kembali bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) harus menjadi acuan utama bagi unsur pimpinan DPRD dalam merumuskan pokok-pokok pikiran untuk kedua Ranperda tersebut.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan lanjutan mengenai Sasaran, Visi, dan IUP Ranperda RPJPD serta RPJMD akan dijadwalkan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari ke depan. 2. Tim penyusun Ranperda RPJPD dan RPJMD direkomendasikan untuk berkonsultasi secara aktif dengan tim penyusun RTRW Provinsi Papua Barat Daya, mengingat RTRW merupakan acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. 3. Seluruh pihak terkait, terutama DPRD, diwajibkan menjadikan dokumen RIPPP dan RAPPP sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Dokumentasi	



13) Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Forum SHEK-Rapat Koordinasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 (Kab/Kota/Provinsi di Papua Barat Daya)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	07 Agustus 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tujuan dari Rapat Koordinasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025–2029 (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi RPJMD provinsi dan kabupaten/kota agar arah kebijakan, program, dan indikator kinerja selaras secara vertikal maupun horizontal, serta memastikan kesesuaian dengan RPJMN, RIPPP, RPJPD Provinsi, dan RPJMD Provinsi oleh kabupaten/kota. 2. Menyelaraskan program prioritas, seperti infrastruktur wilayah, pendidikan vokasi, layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal, agar sejalan dengan RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota. 3. Membentuk Forum Koordinasi Perencanaan Daerah melalui Musrenbang RPJMD yang terintegrasi lintas wilayah, serta pembentukan tim sinkronisasi provinsi–kabupaten.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Direktur PIT Bappenas; Kepala Bapperida PBD; Bangda-Kemendagri; Kepala

	BPKP PBD; Kepala BPS PB; Seluruh Bappeda dan Inspektorat APIP se-PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpaduan Kebijakan Pusat–Daerah. Penyelarasan RPJMD memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional (RPJPN, RPJMN, RIPPP, dan RKP), sekaligus menghindari tumpang tindih program antarlevel pemerintahan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. 2. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Daerah. Dengan perencanaan yang selaras, APBD dapat diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas dicapai melalui belanja yang lebih terfokus pada kegiatan berdampak (outcome-based budgeting). 3. Penguatan Basis Data Pembangunan. Penyelarasan mendorong pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi melalui Satu Data Indonesia, sehingga perencanaan program berbasis kebutuhan nyata daerah. Hal ini mengurangi keputusan berbasis asumsi dan meningkatkan akurasi perencanaan. 4. Partisipasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan. Forum Musrenbang menjadi sarana sinkronisasi aspirasi masyarakat dengan prioritas daerah dan nasional, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap pembangunan. 5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan. Proses penyelarasan mendorong aparatur daerah meningkatkan kemampuan analisis perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi modern (SIPD, e-Planning, e-Budgeting).

	<p>6. Pemerataan dan Keberlanjutan Pembangunan. Keselarasan antar daerah meminimalkan kesenjangan pembangunan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan diarahkan lebih inklusif dengan memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibentuk Forum Penyelarasan RPJMD Papua Barat Daya 2025–2029 sebagai wadah koordinasi lintas kabupaten/kota. 2. Perlu disusun Matriks Program Prioritas Bersama Papua Barat Daya, dengan fokus pada isu strategis seperti pengembangan SDM, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan tata kelola pemerintahan. 3. Perlu penetapan indikator kinerja pembangunan daerah yang terukur dan selaras dengan indikator nasional serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). 4. Membangun kolaborasi efektif dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra pembangunan internasional untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan mendorong inovasi. 5. Memastikan partisipasi aktif masyarakat adat, pemuda, dan perempuan Papua dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
<p>Dokumentasi</p>	



14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	08 Agustus 2025 di Hotel Vega Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Papua Barat Daya dengan RIPP, sekaligus memberikan materi sebagai narasumber terkait proses sinkronisasi. 2. Mendiskusikan rancangan awal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya 2025–2029 dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. 3. Mengakomodasi aspirasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta lembaga adat dalam perumusan RPJMD.

	<p>4. Merumuskan strategi pembangunan yang menekankan percepatan pelayanan dasar, peningkatan ekonomi daerah, dan penguatan tata kelola pemerintahan.</p> <p>5. Menetapkan kesepakatan Musrenbang sebagai dasar penyempurnaan RPJMD Provinsi Papua Barat Daya.</p>
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat & Produktif); Pemda PBD; Bapperida/Bappeda se-PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>1. Komitmen Perencanaan yang Baik. Diharapkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, karena perencanaan yang baik menjadi dasar penganggaran yang efektif dan efisien serta mendukung pembangunan yang optimal.</p> <p>2. Kesepakatan Visi dan Misi RPJMD. Perumusan visi dan misi pembangunan menekankan peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian lingkungan.</p> <p>3. Penetapan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan. Meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa/kelurahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan rakyat), serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mitigasi bencana.</p> <p>4. Integrasi Perencanaan dengan Dokumen Nasional. RPJMD Papua Barat Daya diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, memperkuat implementasi RIPPP sebagai dasar percepatan pembangunan di tanah Papua, dan mengakomodasi kebijakan afirmatif dalam RAP Otsus serta RAPPP.</p>

	<p>5. Komitmen Stakeholder. Bappenas berperan sebagai penjamin kualitas (quality assurance) perencanaan; BP3OKP bertugas mengawal implementasi Otsus dan sinkronisasi pembangunan Papua; sedangkan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis perlu menyiapkan data sektoral sebagai dasar indikator pencapaian target pembangunan.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<p>Mengawal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang direncanakan selama lima tahun ke depan. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat integrasi RPJMD dengan RPJMN, RIPP, dan RAP Otsus agar pembangunan Papua Barat Daya menjadi bagian dari prioritas nasional. 2. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang realistis dan berbasis kebutuhan lokal. 3. Mendorong inovasi pendanaan melalui kombinasi APBN, APBD, Otsus, dan skema KPBU/investasi swasta. 4. Memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pendekatan affirmative action. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala berbasis data sektoral yang valid, transparan, dan partisipatif.
<p>Dokumentasi</p>	

15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Monev Program MBG di Kabupaten Sorong (SPPG Klamasen)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11 Agustus 2025 di SPPG Klamasen, Distrik Klamasen, Kabupaten Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menghadiri pertemuan evaluasi program MBG di Kabupaten Sorong untuk: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan klarifikasi terkait adanya ulat pada makanan yang dibagikan oleh SPPG Klamasen, yang dikembangkan oleh Yayasan Cahaya Ufuk Timur. Membahas pembentukan Satgas MBG pada tingkat Kabupaten Sorong.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja); Pengurus SPPG Klamasen
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi akan diberikan kepada penyedia program MBG dengan beberapa catatan, termasuk pengurangan jumlah penerima manfaat. Evaluasi akan dilakukan apabila ingin menambah jumlah penerima kembali. Rapat koordinasi segera dilaksanakan bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas teknis pelaksanaan MBG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Adanya belatung pada makanan disebabkan oleh human error dalam penyajian dan prosedur yang terlewat oleh mitra pada SPPG Klamasen. Pembentukan Satgas MBG telah dilakukan dan saat ini hanya menunggu tanda tangan pengesahan dari Bupati Kabupaten Sorong.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak penyedia menandatangani pakta integritas agar dapat melanjutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 2. Proses masak di SPPG Klamasen ditunda sementara, dengan rekomendasi perbaikan pada bangunan dapur dan SOP penyiapan makanan di SPPG Klamasen, Mariat, Kabupaten Sorong. 3. Satgas MBG Kabupaten Sorong segera ditandatangani oleh Bupati agar dapat melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong.
Dokumentasi	

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11-12 Agustus 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menghadiri undangan kegiatan.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Panitia Jambore MA PBD Tahun 2025; Gubernur PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-

Dokumentasi

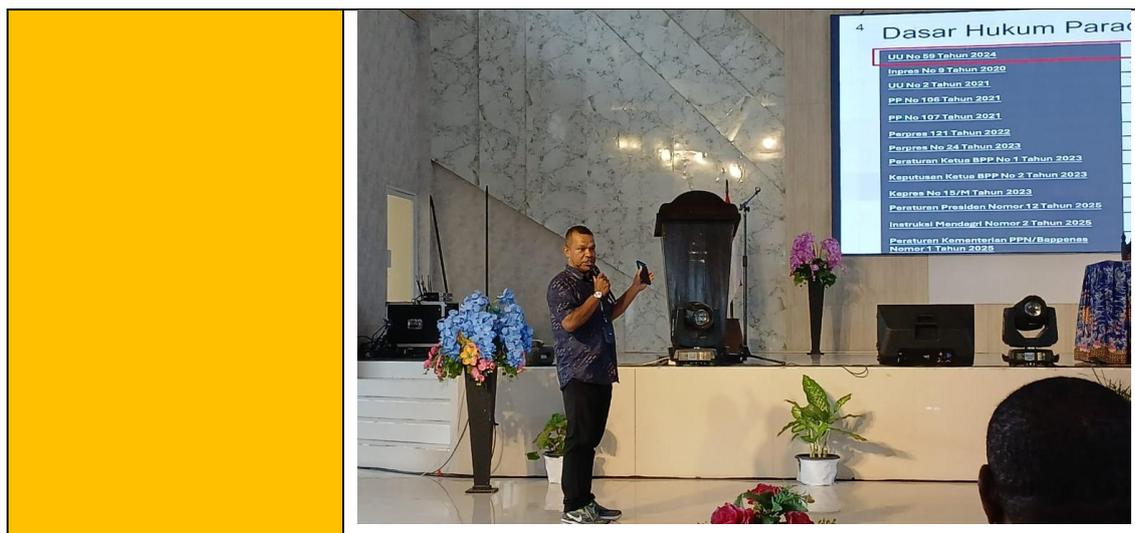


17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Musrenbang RPJPD Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	12 Agustus 2025 di Gedung Pertemuan Samusiret Kumorkek Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Maybrat. 2. Menyelaraskan RPJPD Kabupaten Maybrat dengan RPJPN 2025–2045, RPJPD Provinsi Papua Barat Daya, serta kebijakan strategis nasional, termasuk RIPP dan program Otonomi Khusus. 3. Mengakomodasi aspirasi masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab Maybrat; Bappeda Kab Maybrat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Misi Pembangunan Kabupaten Maybrat, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja. • Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan UMKM. • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah. • Pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mitigasi perubahan iklim. • Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, digital, dan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Identifikasi Isu Strategis Daerah, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan kualitas SDM dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). • Tingginya angka kemiskinan dan stunting. • Keterbatasan infrastruktur dan keterisolasian wilayah. • Lemahnya daya saing ekonomi lokal dan akses pembiayaan UMKM. • Kerentanan lingkungan dan ancaman bencana. 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> • RPJPD Kabupaten Maybrat diselaraskan dengan RPJPN 2025–2045, RPJPD Provinsi Papua Barat Daya, serta kebijakan afirmasi Papua (Otsus, RAPPP, dan RIPPP). • Arah pembangunan daerah diintegrasikan dengan visi Indonesia Emas 2045. 4. Komitmen Bersama Stakeholder:

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah dan DPRD menyepakati prioritas pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. • BP3OKP berperan dalam menjembatani sinkronisasi program Otsus dan pembangunan daerah. • Bappenas memastikan quality assurance dalam proses penyusunan RPJPD. • Partisipasi masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan dunia usaha diakui sebagai bagian penting dari perencanaan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kapasitas Bappeda dalam integrasi perencanaan berbasis data sektoral. 2. Menyusun roadmap investasi daerah yang ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal. 3. Mengembangkan SDM melalui program beasiswa afirmasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. 4. Memastikan program pengentasan kemiskinan dan stunting menjadi prioritas lintas sektor. 5. Mengoptimalkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, Dana Otsus, dan skema KPBU/investasi swasta. 6. Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang berbasis digital dan partisipatif.
Dokumentasi	



18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Pembentukan Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tambrauw
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	12 Agustus 2025 di Aula Rumah Sakit Pratama Fef
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sinkronisasi program antara OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Keluarga Berencana. Memberikan materi terkait percepatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); Dinas PPPA dan KB Kab Tambrauw; RS Pratama Fef Tambrauw; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Terbentuk Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrauw. Terjalin penyamaan persepsi antara OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tim Provinsi, dan BP3OKP terkait program pelayanan dan perlindungan perempuan serta anak.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Akan dilakukan evaluasi kinerja OPD terkait pemenuhan standar minimal perlindungan perempuan dan anak.
Dokumentasi	

19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Audiensi dengan LMA Kaiso
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	12 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan utama pertemuan adalah mendengarkan saran dan masukan dari LMA Kaiso mengenai percepatan pembangunan di wilayah Adat Kaiso, yang mencakup sekitar 3.000 jiwa di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Diskusi difokuskan pada dua isu utama, yaitu politik dan ekonomi.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); LMA Kaiso
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan Keterwakilan Politik: Adanya rasa ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses politik lokal membuat LMA Kaiso merasa tidak terwakili, bahkan muncul aspirasi pemisahan diri terkait Calon DOB IMEKKO. 2. Ketidakmerataan Manfaat Ekonomi: Masyarakat adat Kaiso belum merasakan dampak positif atau manfaat

	<p>ekonomi yang signifikan dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka oleh industri besar, termasuk terkait dana bagi hasil yang seharusnya menjadi hak mereka.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Aspirasi Politik: Mengadvokasi aspirasi LMA Kaiso terkait status wilayah mereka di dalam atau di luar Calon DOB IMEKKO, dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan sosial. 2. Audit dan Evaluasi Manfaat Ekonomi: Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kontribusi ekonomi dan sosial dari PT ANJ Agri Papua (ANJAP) dan Perhutani di wilayah adat Kaiso, serta menindaklanjuti status aset yang terbengkalai ke pihak Perhutani Pusat di Jakarta. 3. Penyelidikan Dana Bagi Hasil: Menginvestigasi pencairan dan distribusi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebesar Rp 2,18 miliar (2025) yang seharusnya diterima oleh wilayah adat Kaiso, termasuk Rp 1,09 miliar yang telah dicairkan. 4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat: Mendorong mekanisme partisipasi yang lebih kuat bagi LMA Kaiso dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang berdampak langsung pada wilayah dan kehidupan mereka.
<p>Dokumentasi</p>	

20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Kapolres Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	14 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima permohonan pertemuan dari Kapolres Kabupaten Maybrat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Kapolres Kab Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	-

21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang II Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 Agustus 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Forkopimda PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-



22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Pengukuhan Paskibra-Rangkaian HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 Agustus 2025 di ACC Aimas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri rangkaian peringatan HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Cerdas); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP, NKRI
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	



23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	Pengibaran Bendera Merah Putih-Rangkaian HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Agustus 2025 di Makolantamal XIV
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri rangkaian peringatan HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP, NKRI
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	



24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Penurunan Bendera Merah Putih-Rangkaian HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Agustus 2025 di Makolantamal XIV
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri rangkaian peringatan HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP, NKRI
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-



Dokumentasi

25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Resepsi Kenegaraan-Rangkaian HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 Agustus 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri rangkaian peringatan HUT RI di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP, NKRI
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	



26) Kegiatan 26

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	18 Agustus 2025 di Kantor DPMPPTSP Kabupaten Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan rapat koordinasi terkait persoalan Makan Berulat pada SPPG Klamasen, Mariat, Kabupaten Sorong. Rapat ini dihadiri oleh Satgas MBG Provinsi, Satgas MBG Kabupaten Sorong, serta pejabat tinggi seperti Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya/Ketua Satgas, dan secara daring oleh Direktur Wilayah III Direktorat Penyediaan dan Penyaluran BGN, dengan tujuan untuk membahas kendala teknis, prosedur operasional, serta tindak lanjut program MBG di wilayah tersebut.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Gubernur PBD; Pemda PBD; Pengurus/Satgas MBG PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	Pihak Pengurus Yayasan Cahaya Ufuk Timur, Kepala SPPG Klamasen, Ahli Gizi, dan Akuntan SPPG Klamasen mengakui adanya kesalahan manusia (human error) dalam proses penyajian makanan. Mereka menyatakan bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila diberikan izin untuk melanjutkan proses memasak kembali di SPPG Klamasen.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan ulang bangunan SPPG Klamasen untuk memastikan kelayakan dan keamanan operasional. 2. Menyusun Pakta Integritas yang akan ditandatangani oleh Perwakilan Yayasan Cahaya Ufuk Timur, Kepala SPPG Klamasen, dan Ketua Satgas MBG Provinsi/Wakil Gubernur, sebagai syarat dilanjutkannya proses memasak.
Dokumentasi	

27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Rapat Evaluasi Ranperda RPJMD PBD Tahun 2025-2029 (Hybrid)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya (Zoom Meetings)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Melakukan sinkronisasi program Provinsi Papua Barat Daya dengan RPJMN dan RAPP, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi substansi Ranperda RPJMD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029.

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN, RIPP, RAP Otsus, dan kebijakan afirmasi Papua. • Pemberian catatan dan rekomendasi perbaikan sebelum penetapan Ranperda RPJMD. • Memastikan integrasi dokumen RPJMD dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Banda-Kemendagri; Bapperda PBD; Bappenas; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPP
Hasil Kegiatan	<p>Provinsi Papua Barat Daya menerima beberapa masukan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan BP3OKP sebagai koreksi untuk menyelaraskan RPJMD dengan RAPP, RPJMN, serta program direktif Presiden terkait percepatan pembangunan. Beberapa catatan perbaikan teknis yang diidentifikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan indikator kinerja pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. 2. Penajaman prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan keunggulan wilayah. 3. Penguatan aspek pembiayaan pembangunan, termasuk strategi pemanfaatan DAK, Dana Otsus, dan KPBU. <p>Selanjutnya, diperlukan revisi teknis dokumen oleh Bappeda PBD sebelum penyampaian kembali ke Ditjen Bangda.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>Segara dilakukan perbaikan RPJMD sebelum diusulkan sebagai Ranperda Provinsi Papua Barat Daya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Papua Barat Daya menindaklanjuti catatan Ditjen Bangda dan menyempurnakan Ranperda RPJMD. 2. BP3OKP memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait program afirmasi Otsus.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kemendagri (Bangda) memberikan asistensi teknis lanjutan untuk memastikan dokumen memenuhi standar evaluasi. 4. Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota agar arah pembangunan daerah selaras dengan RPJMD Provinsi. 5. DPRD Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti pembahasan Ranperda setelah hasil evaluasi final diperoleh.
<p>Dokumentasi</p>	 

28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	Musrenbang RPJMD Kabupaten Maybrat Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	19 Agustus 2025 di Gedung Pertemuan Samusiret Kumorkek Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, termasuk penyesuaian RPJMD Kabupaten Maybrat dengan RPJPN 2025–2045, RPJMD Provinsi Papua Barat Daya,

	serta RIPPP. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis lokal yang relevan dengan agenda pembangunan nasional, serta memberikan arahan terkait penetapan program prioritas dan indikator kinerja utama (IKU) untuk periode lima tahun mendatang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, tokoh adat, agama, akademisi, dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Maybrat.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab Maybrat; Bappeda Kab Maybrat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>Tim penyusun RPJMD Kabupaten Maybrat menerima berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk DPRD, OPD, masyarakat adat, tokoh agama, dan dunia usaha, serta berkomitmen untuk memperbaiki dokumen perencanaan sesuai masukan yang diberikan. Dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Maybrat 2025–2029, dicapai kesepakatan arah kebijakan pembangunan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan kerja; • Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan UMKM; • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah; • Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; • Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, digital, dan partisipatif. <p>Program prioritas Kabupaten Maybrat diharapkan selaras dengan percepatan pembangunan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, di mana Papua Sehat dan Cerdas berkaitan</p>

	<p>dengan layanan pendidikan dan kesehatan inklusif, sedangkan Papua Produktif berfokus pada ketahanan pangan, pertanian modern, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Daya dukung yang diperlukan meliputi infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, telekomunikasi, listrik), reformasi birokrasi digital (transparansi, partisipasi, pelayanan publik berbasis teknologi), serta pembangunan lingkungan lestari (perlindungan hutan, energi terbarukan, dan adaptasi perubahan iklim).</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan finalisasi dokumen RPJMD Kabupaten Maybrat sesuai masukan dari musrenbang, DPRD, dan OPD terkait. 2. Menyelaraskan RPJMD Kabupaten Maybrat dengan RPJPN 2025–2045, RPJMD Provinsi Papua Barat Daya, serta RIPPP, sehingga program pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional. 3. Melakukan sosialisasi dokumen RPJMD kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan agar program prioritas dan indikator kinerja utama dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.
<p>Dokumentasi</p>	



29) Kegiatan 29

Nama Kegiatan	Audiensi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	20 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menerima permohonan audiensi dari pihak Bank Papua.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Cerdas); Tim Bank Papua Cabang Utama Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Papua menyampaikan niat untuk bekerjasama dengan BPP sebagai bank penyalur dalam rangka penggajian pegawai, sehingga seluruh proses pembayaran gaji dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan tepat waktu. 2. BPP Papua Barat Daya menerima dengan baik niat Bank Papua untuk menjadi bank penyalur dalam penggajian pegawai. Namun, hal ini perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Sekretariat BPP Jayapura/Kantor Wilayah DJPb Papua, sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggajian. Oleh karena itu, BPP PBD belum dapat memberikan jawaban

	final dan perlu melakukan diskusi lebih lanjut sebelum keputusan akhir.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Informasi mengenai niat Bank Papua untuk menjadi bank penyalur penggajian pegawai akan disampaikan kepada Kepala Sekretariat BPP Jayapura/Kantor Wilayah DJPb Papua untuk dibahas lebih lanjut dan mendapatkan arahan resmi.
Dokumentasi	 

30) Kegiatan 30

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	20 Agustus 2025 di Kantor Gubernur PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah hadir dan terlibat pada rapat koordinasi dimaksud, yang dilaksanakan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Satgas dengan fokus pada

	dua hal utama: memastikan pendanaan yang jelas dan menyusun pembagian peran yang terstruktur di antara anggota Satgas.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Gubernur PBD; Pemda PBD; Pengurus/Satgas MBG PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	Rapat menyimpulkan bahwa inefektivitas kerja Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya saat ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kurangnya pembagian peran yang jelas di antara pimpinan OPD anggota Satgas, serta ketidakjelasan sumber pendanaan yang mencakup alokasi anggaran dan mekanisme pengelolaan dana untuk mendukung tugas dan kegiatan Satgas.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Pembagian Tugas: Satgas MBG segera menyusun pedoman atau matriks pembagian tugas yang rinci antar OPD, termasuk penunjukan penanggung jawab spesifik untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Revisi SK Satgas MBG: Segera merevisi SK Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya agar secara eksplisit mencantumkan Kepala BPKAD Provinsi sebagai bendahara Satgas. 3. Identifikasi Sumber Pendanaan: Melakukan koordinasi dengan BPKAD dan instansi terkait lainnya untuk memastikan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan bagi operasional Satgas MBG. 4. Sosialisasi Peran dan Fungsi: Setelah revisi SK dan pedoman tugas ditetapkan, dilakukan sosialisasi intensif kepada seluruh anggota Satgas dan OPD terkait mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.



31) Kegiatan 31

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi KEK Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	20 Agustus 2025 di Kediaman Bupati Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut rapat Dewan Kawasan KEK Sorong. Asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat Daya dan Kepala Biro Ekonomi & Kesra bersama Sekretariat Dewan Nasional KEK membahas rencana penghapusan KEK Sorong akibat tidak adanya aktivitas ekonomi dan ketidakpenuhan standar investasi KEK secara nasional. Kegiatan ini bertujuan mencari solusi dan menetapkan langkah-langkah konkrit untuk menyelamatkan KEK Sorong.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Usulan Pokja); Gubernur PBD; Bupati Sorong dan Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi

Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>KEK Sorong merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, dengan fokus pada industri pengolahan nikel, perdagangan, dan pergudangan/logistik, dibentuk berdasarkan PP No. 31 Tahun 2016 dengan luas area 523,7 hektar. Secara kumulatif, KEK ini telah berhasil menarik investor, namun hingga tahun 2025 banyak investor mengundurkan diri akibat beberapa faktor, termasuk kebijakan nasional terkait KEK Sorong dan kurangnya infrastruktur pendukung, meskipun potensi investasinya sangat besar.</p> <p>Dewan Kawasan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan menghindari penghapusan status KEK Sorong oleh Setdenas. Pemda diharapkan mengambil tindakan konkrit dalam pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan jaringan air bersih, untuk menunjukkan keseriusan dukungan terhadap KEK Sorong. Rencananya pada tahun 2026 akan dilaksanakan pembangunan lanjutan, termasuk jalan masuk kawasan, sekretariat KEK, dan jaringan air bersih yang didukung oleh BWS.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda akan menyelesaikan komitmen penggunaan air baku secara tertulis dan meneruskan dokumen ke BWS untuk mendukung pembangunan lanjutan jaringan air baku dari Klamono ke KEK. 2. Pada tahun 2026, akan dilakukan pembangunan akses jalan ke seluruh area KEK beserta sektor-sektornya, serta pembangunan kantor Sekretariat KEK. 3. Pembiayaan kajian dilakukan pada area masuk kapal yang memiliki terumbu karang, dengan tujuan memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan agar area tersebut dapat digunakan sebagai akses keluar-masuk kapal berbobot besar. 4. Mendorong BUPP untuk bekerja lebih profesional dalam pengelolaan dan pengembangan KEK.

	<p>5. Untuk rencana jangka menengah, diperlukan pembentukan tim yang mampu melobi dan meyakinkan pemerintah pusat terkait penetapan KEK dan investasi. Pemprov perlu menyediakan dana awal sebagai modal untuk investasi di KEK.</p> <p>6. BP3OKP akan memfasilitasi pertemuan Dewan Kawasan KEK/BUPP dengan Wakil Presiden RI guna memperkuat dukungan dan komitmen nasional terhadap pengembangan KEK Sorong.</p>
Dokumentasi	

32) Kegiatan 32

Nama Kegiatan	Sosialisasi dan FGD Perluasan Jangkauan Penyaluran Pembiayaan UMKM, Monev dan Bimtek SIKP, dan Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan KDMP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Agustus 2025 di Kanwil BC Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah menghadiri dan mendampingi pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Perluasan Jangkauan Penyaluran Pembiayaan UMKM, Monev dan Bimtek SIKP, serta Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan KDMP yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Papua Barat, agar BPP PBD dapat memastikan pendampingan yang optimal sekaligus memahami mekanisme penyaluran pembiayaan dan pembinaan bagi KDMP serta BLUD.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja); Tim DJPB Papua Barat; Dinas UMKM dan Koperasi PBD; Bank BRI KC/P Sorong

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran para Pemangku Kepentingan mengenai mekanisme perluasan jangkauan penyaluran pembiayaan UMKM, penggunaan SIKP, tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan KDMP, serta pembinaan dan pengelolaan BLUD.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>Kegiatan FGD, Monev, dan Bimtek ini telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperluas akses pembiayaan UMKM, memperkuat pemanfaatan SIKP, serta merancang tata cara pinjaman KDMP yang lebih inklusif. Diharapkan, tindak lanjut dari kegiatan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan produktif di Papua Barat Daya, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan daerah.</p>
Dokumentasi	

33) Kegiatan 33

Nama Kegiatan	Sosialisasi dan FGD Asistensi Pembinaan BLUD
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	21 Agustus 2025 di Kanwil BC Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pendampingan oleh BPP Papua Barat Daya terhadap kegiatan sosialisasi dan FGD terkait asistensi pembinaan BLUD yang dilaksanakan oleh DJPb Papua Barat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan di daerah.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja); Tim DJPb Papua Barat; BPKAD Kota-Kab Sorong, PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan oleh tim DJPb Papua Barat diterima dengan baik, dan diskusi yang berlangsung selama sosialisasi dan FGD berjalan efektif, menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi peserta terkait pembinaan BLUD.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	perlunya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap pengelolaan BLUD, untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja unit BLUD di Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	



34) Kegiatan 34

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perumahan Perkotaan)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	25 Agustus 2025 di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program perumahan dan kawasan permukiman dengan kebijakan kabupaten/kota di Papua, membahas dukungan teknis dan pembiayaan dari Kementerian PUPR terhadap program perumahan, serta memperkuat peran BP3OKP sebagai koordinator lintas sektor dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim Dirjen Perumahan Perkotaan-KemenPKP
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif & Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	Hasil kegiatan menunjukkan beberapa capaian penting: tersedianya akses khusus bagi masyarakat Papua melalui skema Kredit Program Perumahan yang adaptif, percepatan penyaluran program 3 Juta Rumah di Papua Barat Daya dengan integrasi ke RPJMD & RIPPP, serta terbentuknya mekanisme koordinasi pusat-daerah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Selain itu, diterapkan skema kredit afirmasi khusus untuk wilayah 3T, peningkatan kapasitas dan literasi keuangan masyarakat,

	<p>sinergi dengan program Papua Produktif melalui pengembangan permukiman produktif, serta dihasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat terkait desain rumah adat, biaya konstruksi, dan model pembiayaan yang kontekstual.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindakanjnt</p>	<p>Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya, pelaku usaha sektor perumahan, serta masyarakat penerima manfaat program perumahan, guna memastikan pemahaman yang merata dan implementasi yang efektif di lapangan.</p>
<p>Dokumentasi</p>	

35) Kegiatan 35

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>25 Agustus 2025 di Menara Bappenas</p>

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi terkait rencana pengesahan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagai dokumen resmi yang sah, sekaligus memastikan dokumen tersebut dapat digunakan secara legal sebagai acuan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga melaksanakan fungsi SHEK bersama tim Bappenas untuk mendukung perencanaan pembangunan di Papua dalam rangka percepatan pembangunan, serta menjalankan fungsi harmonisasi terhadap kinerja Pokja selama pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD) Provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan peran aktif Bappenas sebagai penjamin kualitas, menjamin konsistensi arah pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, mendorong percepatan legalisasi RAPPP untuk efektivitas penganggaran APBN dan APBD (2025–2029), serta memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah melalui indikator yang jelas, terukur, dan selaras dengan target nasional.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Tim Bappenas/Kemen PPN
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Pengesahan RAPPP sebagai acuan penyusunan dokumen RPJMD terbukti sangat penting agar perencanaan pembangunan lebih terarah, karena RAPPP telah melalui berbagai proses pembahasan dan diskusi sehingga mencakup program percepatan pembangunan yang terukur dengan indikator sesuai misi Sehat, Cerdas, dan Produktif. Fungsi sinkronisasi dan harmonisasi yang dilaksanakan selama ini dinilai tepat, dan diharapkan Pokja dapat lebih berperan aktif dalam pendampingan dokumen perencanaan daerah (DOKRENDA) kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, koordinasi BP3OKP dengan Kementerian

	<p>PPN/Bappenas diharapkan memperkuat posisi Papua sebagai wilayah prioritas nasional, sehingga perencanaan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga terintegrasi dengan kerangka pembangunan nasional melalui pengawasan dan penjaminan kualitas dari Bappenas.</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sambil menunggu pengesahan Presiden, RAPPD tetap digunakan sebagai acuan perencanaan program pembangunan sesuai misi Sehat, Cerdas, dan Produktif. 2. Pendampingan OPD teknis dalam penyusunan Renstra OPD perlu ditingkatkan agar program lebih spesifik dan terukur. 3. Bappenas perlu menjalankan peran strategis sebagai penjamin kualitas (quality assurance) agar dokumen RPJMD di Papua konsisten dengan RPJMN dan RAPPD. 4. Mekanisme asistensi teknis dan evaluasi rutin dari Bappenas harus diformalkan pada setiap tahapan penyusunan perencanaan daerah. 5. Perlu menjaga interoperabilitas yang efektif antara perencanaan pusat dan daerah. 6. Pemerintah daerah Papua harus menyelaraskan RPJMD dengan RAP Otsus dan RAPPD agar instrumen perencanaan saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan terarah pada pencapaian sasaran pembangunan nasional serta kebutuhan spesifik Papua.
<p>Dokumentasi</p>	

36) Kegiatan 36

Nama Kegiatan	Musrenbang RPJMD Kota Sorong Tahun 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	25 Agustus 2025 di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembobotan dan masukan strategis guna perbaikan dokumen RPJMD Kota Sorong 2025–2029, sehingga perencanaan pembangunan daerah lebih terarah, realistis, dan selaras dengan prioritas nasional maupun kebutuhan lokal.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD Kota Sorong 2025–2029 sudah sesuai arah hukum dan kebijakan nasional serta provinsi, namun masih perlu penajaman isu lokal Papua, termasuk afirmasi OAP, kampung adat, dan Otsus. 2. Kelemahan utama: indikator pembangunan terlalu makro, aspek GEDSI dan afirmasi OAP belum tercantum secara eksplisit. 3. Masalah mendasar: rendahnya PAD, tingginya kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kondisi pemukiman kumuh dan lingkungan yang belum memadai. 4. Peluang strategis: posisi Kota Sorong sebagai gerbang Papua, dukungan Dana Otsus, potensi investasi swasta, serta peran multipihak yang dapat mendorong percepatan pembangunan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Dokumen RPJMD <ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan konsideran khusus Papua serta afirmasi untuk OAP dan kampung adat. • Perbaiki indikator agar lebih terukur, mencakup skala mikro, sektoral, dan wilayah. • Integrasikan program strategis bersama sesuai ketentuan PMK 33/2024. 2. Penguatan Data & Analisis

- Gunakan data terbaru dari BPS terkait kemiskinan, stunting, dan IPM.
 - Masukkan analisis risiko fiskal terkait PAD rendah dan belanja aparatur.
3. Fokus Isu Prioritas Kota Sorong
- Penanggulangan banjir dan pengelolaan tata kota.
 - Peningkatan mutu SDM dan pendidikan.
 - Afirmasi kebijakan untuk OAP dan kampung adat.
 - Peningkatan layanan dasar, termasuk air bersih, kesehatan, dan gizi anak.
 - Diversifikasi ekonomi lokal, seperti UMKM digital, perikanan, dan pariwisata pesisir.
4. Strategi Pendanaan
- Optimalisasi PAD dan retribusi daerah.
 - Alokasi Dana Otsus fokus pada OAP dan wilayah tertinggal.
 - Kembangkan skema KPBU, CSR, dan investasi swasta sebagai sumber pendanaan tambahan.

Dokumentasi



37) Kegiatan 37

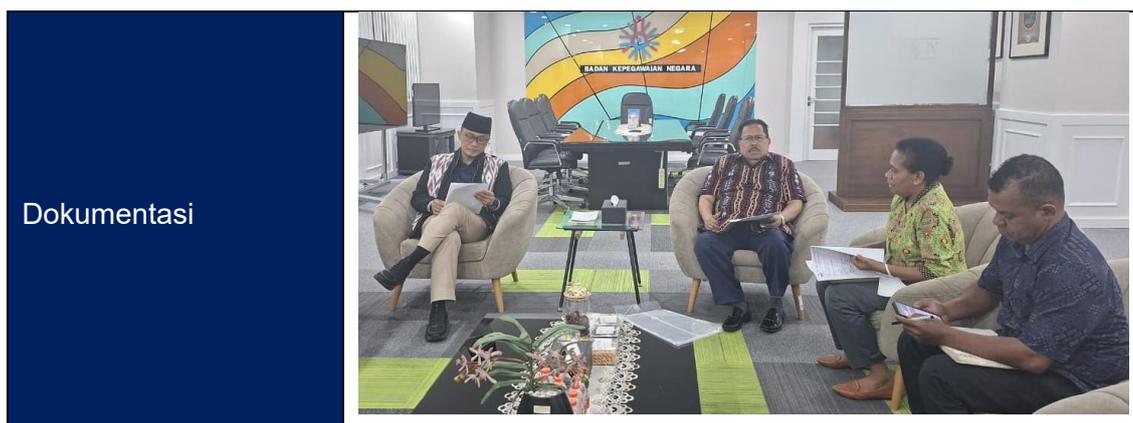
Nama Kegiatan	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 Agustus 2025 di ACC Aimas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan (Raker Kesda) untuk meningkatkan sinergi antara Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan kesehatan, membahas capaian yang telah diraih, serta merumuskan kesepakatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berkualitas.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat, Usulan Pokja, PPNPN); Kemenkes; Dinas Kesehatan Se-PBD; Pemda PBD; Gubernur PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Raker Kesda Papua Barat Daya menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, percepatan pencapaian program nasional (PKG, stunting, TBC/HIV/malaria), serta peningkatan kualitas data kesehatan. Pemprov merencanakan rekrutmen dokter spesialis, pembangunan RS rujukan, penguatan posyandu, dan intervensi gizi 1.000 HPK. Dukungan lintas sektor, termasuk pendidikan, pertanian, dan perikanan, serta kolaborasi dengan kabupaten/kota, DPR RI, dan mitra pembangunan, dianggap kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan merata, SDM yang sehat, dan pencapaian target RPJMD 2025–2029.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Rekrut 10 dokter spesialis per tahun dan kirim 2 dokter umum per kabupaten untuk studi • Tempatkan dokter kontrak di daerah sulit dijangkau

	<ul style="list-style-type: none">• Latih dan beri insentif kader posyandu/nakes dengan afirmasi OAP <ol style="list-style-type: none">2. Infrastruktur<ul style="list-style-type: none">• Bangun RS Rujukan Provinsi dan advokasi pembangunan RS di Maybrat• Lengkapi alat vaksinasi dan peralatan TBC• Percepat akreditasi puskesmas dan rumah sakit3. Program Prioritas<ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan capaian PKG (target >20%)• Turunkan stunting melalui dapur gratis dan program 1.000 HPK• Perkuat penanganan TBC, HIV, dan malaria• Mulai program pencegahan penyakit tidak menular4. Data & Tata Kelola<ul style="list-style-type: none">• Sinkronkan data dari BPS, e-PPGBM, dan survei lainnya• Tingkatkan input data dan monitoring melalui sistem informasi kesehatan5. Sinergi Lintas Sektor<ul style="list-style-type: none">• Pertanian dan perikanan mendukung gizi masyarakat• Pendidikan: jalankan program Sekolah Rakyat6. Koordinasi dengan Mitra<ul style="list-style-type: none">• Tingkatkan koordinasi dengan DPR RI, UNICEF, dan mitra pembangunan lainnya
Dokumentasi	

38) Kegiatan 38

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 Agustus 2025 di Kantor BKN Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi terkait implementasi Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN/P3K ke satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. 2. Melakukan konsultasi terkait status nonaktif SK ASN (dosen) yang ditugaskan pada BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya. 3. Mendapatkan arahan teknis terkait penyesuaian regulasi (UU ASN, PP, dan PermenPANRB) untuk jabatan fungsional dosen. 4. Menyusun rekomendasi kebijakan agar penugasan dosen fungsional di BP3OKP tidak menghambat pengembangan karier dan pemenuhan angka kredit. 5. Memastikan sinkronisasi antara sistem kepegawaian nasional (BKN) dengan kebutuhan kelembagaan BP3OKP.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja Cerdas, Produktif); Kepala BKN
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan harmonisasi terkait implementasi Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen, BKN, dan Menpan-RB, dengan rencana validasi dimulai pada November 2025. 2. Harmonisasi terkait regulasi yang digunakan untuk menonaktifkan Jabatan Fungsional Dosen perlu dikaji secara mendalam agar menghasilkan rekomendasi dan keputusan bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penugasan dosen fungsional di BP3OKP dapat dilaksanakan dengan syarat sesuai regulasi ASN dan mekanisme BKN. 4. Diperlukan payung hukum formal (MoU) antara BP3OKP, perguruan tinggi asal dosen, dan BKN untuk mendukung pelaksanaan penugasan. 5. BP3OKP bersama Bappenas dan Kemendikbudristek perlu merumuskan format penugasan dosen yang mendukung misi pembangunan Papua sekaligus menjaga karier akademik dosen. 6. Diperlukan sistem pelaporan kinerja terintegrasi agar penugasan di BP3OKP berkontribusi pada angka kredit dosen.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Finalisasi Dapodik Sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Disdik kab/kota memantau dan memastikan penginputan data Dapodik sebagai dasar validasi kebutuhan guru di tiap sekolah. • Batas akhir: 9 September 2025. 2. Koordinasi Status Nonaktif Jabatan Fungsional Dosen <ul style="list-style-type: none"> • Buat surat resmi dari BP3OKP PBD–Unipa untuk memperjelas status nonaktif jabatan fungsional. • Unipa menyusun kajian bersama, kemudian diteruskan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk dibahas di Biro SDM. • Hasil rekomendasi disampaikan kepada BKN dan BP3OKP. • Koordinasi lanjutan dilakukan dengan instansi induk (Universitas Papua), dapat dibuat dalam bentuk kronologis administratif sebagai bahan tindak lanjut resmi ke kementerian.



Dokumentasi

39) Kegiatan 39

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	27 Agustus 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audiensi dengan BPS Kota Sorong untuk memfasilitasi koordinasi antara BPS dan Pemda Kota Sorong (Sekda). 2. Mendukung permintaan BPS terkait data produk unggulan Kota Sorong dan data lainnya yang selama ini hanya tersedia terbatas di beberapa OPD. 3. Menindaklanjuti survei BPS terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di dapur dan sekolah-sekolah.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Usulan Pokja); BPS Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audiensi menghasilkan pemahaman bersama tentang kebutuhan data yang diperlukan BPS untuk program statistik dan survei. 2. BPS akan mengirimkan surat resmi kepada BPP untuk memfasilitasi permintaan data dan koordinasi lebih lanjut dengan Pemda. 3. Teridentifikasi beberapa permasalahan yang perlu perhatian, terutama terkait pengumpulan data MBG dari dapur hingga sekolah-sekolah.

<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Koordinasi BPP Papua Barat Daya mendampingi pertemuan antara BPS dan Sekda Kota Sorong untuk memastikan akses data yang lebih lengkap. 2. Penyediaan Data BPP memfasilitasi pengumpulan dan penyediaan data produk unggulan Kota Sorong serta data terkait OPD lain yang relevan dengan survei BPS. 3. Tindak Lanjut Survei MBG BPP membantu memastikan data MBG dari dapur hingga sekolah dapat tersaji lengkap dan akurat untuk keperluan BPS. 4. Koordinasi Administratif Menyusun kronologis permintaan dan alur distribusi data sebagai dasar tindak lanjut resmi antara BPS, BPP, dan Pemda.
<p>Dokumentasi</p>	

40) Kegiatan 40

<p>Nama Kegiatan</p>	<p>Koordinasi dengan Kemenkes RI (Dirjen Yankes)- Pendampingan Pemda Sorong Selatan</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)</p>	<p>27 Agustus 2025 di Kantor Kemenkes Jakarta</p>
<p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi Pemerintah Daerah Sorong Selatan dalam diskusi bersama Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

	2. Memastikan perkembangan dan alokasi alat kesehatan yang telah diusulkan melalui sistem SIREN Kementerian Kesehatan berjalan sesuai rencana.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Pemda Kab Sorsel (Bupati dan Tim)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Kabupaten Sorong Selatan menyambut positif komitmen Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan layanan di RSUD Scholoo, khususnya melalui distribusi alat kesehatan yang diharapkan dapat menunjang pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan. 2. Anggota BP3OKP menegaskan komitmen pelaksanaan tugas pendampingan untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindakanjnt	Mengawal secara optimal serta menyiapkan sarana dan prasarana sebagai wujud komitmen daerah dalam pelaksanaan program layanan kesehatan, khususnya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
Dokumentasi	 



41) Kegiatan 41

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Perum Perhutani-Pendampingan Pemda Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	28 Agustus 2025 di Kantor Perum Perhutani Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tujuan Pelaksanaan Koordinasi dengan Perum Perhutani – Pendampingan Pemda Sorong Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Potensi Lokal: Mengaktifkan kembali pabrik sagu di Distrik Kais agar cadangan sagu alami dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. 2. Mendukung Program Nasional dan Daerah: Sejalan dengan Perpres 24/2023, Perpres 12/2025, dan Inmen 1/2025, mendukung percepatan pembangunan Papua berbasis sumber daya lokal serta program Misi Papua Produktif, menjadikan sagu salah satu pilar ketahanan pangan nasional. 3. Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lokal: Membangun kemitraan Perhutani dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat melalui koperasi Merah Putih, BUMDes, atau perhutanan sosial, termasuk memberikan ruang kerja dan distribusi keuntungan bagi masyarakat sekitar pabrik. 4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Ekonomi Baru: Aktivasi pabrik membuka lapangan kerja langsung

	<p>(pekerja pabrik, operator, tenaga teknis) dan tidak langsung (petani sagu, transportasi, UMKM olahan), meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada komoditas luar.</p> <p>5. Mendorong Hilirisasi Industri Pangan Lokal: Pabrik diarahkan menghasilkan pangan olahan (mie sagu, biskuit, roti bebas gluten), bioenergi (etanol), dan pakan ternak, sejalan dengan agenda hilirisasi nasional berbasis sumber daya alam.</p> <p>6. Penguatan Kedaulatan Pangan Papua: Menjadikan sagu sebagai identitas dan instrumen kedaulatan pangan daerah, sekaligus pusat produksi dan distribusi pangan bergizi untuk sekolah, puskesmas, dan program sosial lainnya.</p>
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Pemda Kab Sorsel
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Produktif)
Hasil Kegiatan	<p>Kabupaten Sorong Selatan – Distrik Kais memiliki potensi hutan sagu yang luas namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sagu bukan hanya pangan pokok tradisional masyarakat Papua, tetapi juga komoditas strategis yang dapat mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan hilirisasi industri pangan nasional. Dengan revitalisasi pabrik sagu dan pengaktifan peran Perhutani di Distrik Kais, diharapkan tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Potensi Sagu Lokal: Mengolah sagu dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, seperti tepung sagu, mie sagu, pakan ternak, dan bioetanol. 2. Mewujudkan Misi Papua Produktif: Selaras dengan Perpres 24/2023, Perpres 12/2025, dan Inmen 1/2025, mendukung percepatan pembangunan berbasis sumber daya lokal. 3. Pemberdayaan Masyarakat Adat: Membangun kemitraan dengan pemilik ulayat, koperasi, dan

	<p>BUMDes agar masyarakat mendapat manfaat langsung dari pengelolaan sagu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penciptaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Baru: Membuka peluang kerja di sektor industri pengolahan, distribusi, dan pengembangan turunan produk sagu. 5. Kontribusi pada Program Nasional: Mendukung program Makan Bergizi Gratis, penguatan pangan lokal, dan pengurangan ketergantungan pada beras impor.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Peran Perhutani melalui Kemitraan: Perhutani perlu menggandeng masyarakat adat melalui Koperasi Merah Putih dan BUMDes untuk bersama-sama mengelola sagu menjadi produk bernilai tambah, seperti tepung sagu, mie sagu, pakan ternak, dan bioetanol. 2. Pemanfaatan Program Perhutanan Sosial: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membuka ruang perhutanan sosial di areal PBPH melalui MoU, khususnya di Distrik Kais pada kawasan yang telah dikelola Perhutani. 3. Kolaborasi dengan Masyarakat Adat melalui Skema Bagi Hasil: Pengelolaan sagu dapat menggunakan pola plasma-inti atau skema bagi hasil agar masyarakat adat tetap memperoleh manfaat langsung dari produksi.
<p>Dokumentasi</p>	

42) Kegiatan 42

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Kemendikdasmen-Pendampingan Pemda Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	29 Agustus 2025 di Kantor Kemendikdasmen Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan SHEK bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen RI) untuk memperoleh informasi dan arahan terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN/P3K ke satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. 2. Implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2023. 3. Pelaksanaan PPG Bauran (Kelas Online) di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Anggota & Pokja); Pemda Kab Sorsel; Tim Kemendikdasmen
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Cerdas)
Hasil Kegiatan	Berdasarkan pelaksanaan fungsi koordinasi SHEK bersama Sesdirjen GTTPG Kemendikdasmen RI, diperoleh beberapa hasil utama: <ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dan BP3OKP di wilayah Tanah Papua bertanggung jawab mendorong optimalisasi implementasi Permendikbud No. 44 Tahun 2023. 2. Diperlukan laporan detail dari setiap kabupaten/kota yang telah melaksanakan regulasi tersebut. 3. Validasi dan pemetaan distribusi guru akan dilakukan setelah proses validasi Dapodik selesai, diperkirakan pada Oktober–November 2025. 4. Pelaksanaan PPG Bauran, baik untuk guru tertentu maupun pra-jabatan, dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah; koordinasi terkait anggaran diperlukan agar kegiatan dapat diimplementasikan sesuai rencana.

	<p>5. BP3OKP diminta mendorong sinkronisasi program Percepatan Papua Cerdas dengan program prioritas Kemendikdasmen RI melalui kebijakan daerah (PERDA).</p>
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya untuk mendorong perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi guru melalui Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 serta pelaksanaan PPG Bauran. 2. Koordinasi dan/atau sinergi SHEK ke Satuan Pendidikan dengan K/L dalam rangka melaksanakan fungsi evaluasi program. Hal ini memerlukan koordinasi lintas tim Pokja 6 provinsi untuk memastikan konsistensi dan efektivitas implementasi.
<p>Dokumentasi</p>	 <p>The top photograph shows a meeting in progress around a large conference table. Several individuals are seated, some using laptops. The bottom photograph shows a group of seven men standing together for a group photo. They are dressed in a mix of traditional batik and modern business attire.</p>

43) Kegiatan 43

Nama Kegiatan	Koordinasi dengan Kemenkes RI (Dirjen SDM)- Pendampingan Pemda Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	29 Agustus 2025 di Kantor Kemenkes Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Mendampingi Direktur dan staf perencanaan SDM RSUD Scholoo dalam audiensi dengan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Data Sumber Daya Kesehatan (PGDS).
Peserta Kegiatan	BP3OKP PBD (Pokja Sehat); Tim Kemenkes-Dirjen SDM
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BP3OKP & RIPPP (Sehat)
Hasil Kegiatan	Sebagai dampak penunjukan tersebut, Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas untuk penempatan SDM KJSU-KIA.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melakukan tindak lanjut terkait ketenagaan bidang kesehatan di RSUD Scholoo untuk menilai kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan program KJSU-KIA.
Dokumentasi	

2.2 Capaian

Selama bulan Agustus 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan berbagai agenda penting yang menitikberatkan pada sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan implementasi program prioritas nasional di Papua Barat Daya. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan dasar, dan advokasi aspirasi masyarakat adat juga menjadi bagian integral dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Adapun capaian utama yang berhasil dicatat selama bulan ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Infrastruktur & Tata Ruang

- a. Audiensi dengan pengelola Bandara Teminabuan dan Inanwatan serta masyarakat adat terkait penyelesaian hak ulayat dan status lahan bandara.
- b. Penegasan pentingnya kepastian hukum tata ruang untuk mendukung pembangunan transportasi udara di kawasan Sorong Selatan dan Inanwatan.

2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- a. Pendampingan Ranwal RPJMD Provinsi Papua Barat Daya 2025–2029 bersama Kemendagri, Bappenas, dan Bapperida.
- b. Keterlibatan dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Sorong dan Maybrat, serta penyusunan RPJPD Maybrat.
- c. Forum SHEK dan Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat Daya menjadi momentum strategis harmonisasi perencanaan lintas daerah dengan RPJMN, RPJPN, dan RIPP.

3. Penguatan Layanan Kesehatan & Pendidikan

- a. Sosialisasi penanganan penyakit stroke bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrau.
- b. Monitoring RSUD Scholoo Keyen serta koordinasi peningkatan layanan Puskesmas Mega.
- c. Monev penyusunan Renstra Pendidikan dan program SSH di Sorong Selatan.
- d. Pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrau.

4. Pemberdayaan Ekonomi & Ketahanan Pangan

- a. Monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, termasuk evaluasi teknis SPPG Klamasen serta pembentukan Satgas MBG kabupaten/kota.
- b. Kolaborasi dengan Kodim 1807 Sorong Selatan dalam revitalisasi Moswaren sebagai sentra pertanian.

- c. FGD dan asistensi pembiayaan UMKM, KDMP, serta BLUD bersama DJPb Papua Barat.

5. Kolaborasi Pusat–Daerah & Kebijakan Nasional

- a. Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengesahan RAPP sebagai acuan resmi pembangunan Papua.
- b. Koordinasi dengan Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman untuk program rumah rakyat afirmatif di Papua Barat Daya.
- c. Rapat koordinasi penyelamatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi strategis.

6. Kebangsaan, Sosial, & Adat

- a. Partisipasi aktif dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Papua Barat Daya (pengibaran, penurunan bendera, upacara, resepsi kenegaraan).
- b. Audiensi dengan LMA Kaiso untuk menindaklanjuti isu keterwakilan politik, manfaat ekonomi SDA, dan distribusi Dana Bagi Hasil Sawit.
- c. Kehadiran pada Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya sebagai dukungan terhadap penguatan identitas dan kebersamaan masyarakat adat.

Rekomendasi umum berdasarkan rekapitulasi kegiatan dan capaian antara lain :

1. Percepatan Penyelesaian Status Lahan & Tata Ruang

Perlu segera dilakukan mediasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian hak ulayat bandara Teminabuan dan status lahan Bandara Inanwatan agar kepastian hukum pembangunan infrastruktur tercapai.

2. Penguatan Sinkronisasi Perencanaan Daerah

RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus terus dikawal agar konsisten dengan RPJMN, RIPP, RAPP, dan kebijakan afirmatif Papua, sehingga arah pembangunan lebih terukur dan tidak tumpang tindih.

3. Optimalisasi Layanan Dasar Sehat & Cerdas

Peningkatan kualitas layanan RSUD, Puskesmas, dan pendidikan perlu diprioritaskan dengan indikator kinerja yang jelas, sambil memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui evaluasi berkala.

4. Penguatan Ekonomi Lokal & MBG

Program MBG harus berbasis pada rantai pasok petani lokal OAP dengan dukungan Satgas yang efektif, jelas peran, dan sumber pendanaannya. Revitalisasi Moswaren sebagai lumbung pangan strategis perlu dipercepat.

5. Afirmasi UMKM, BLUD & Perumahan

Akses pembiayaan UMKM, KDMP, dan BLUD harus diperluas dengan asistensi teknis yang berkelanjutan. Program perumahan afirmatif perlu memperhatikan desain lokal dan kebutuhan masyarakat adat.

6. Penguatan Tata Kelola & Akuntabilitas

Diperlukan penguatan koordinasi dengan Bappenas, DJPb, dan Kemenkeu terkait akurasi data sektoral, transparansi pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis Satu Data Papua.

7. Advokasi Aspirasi Masyarakat Adat

Aspirasi politik dan ekonomi masyarakat adat (seperti LMA Kaiso) perlu diakomodasi dalam kebijakan formal. Mekanisme distribusi manfaat SDA dan Dana Bagi Hasil harus transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk realisasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Agustus 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.